

ABSTRAK

Adri Firman Ramadhan, 1228010003, 2026: “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung”

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, namun keberadaannya seringkali menghadapi berbagai permasalahan seperti ketidaktertiban, keterbatasan akses perizinan, serta rendahnya kapasitas usaha. Di Kota Bandung, jumlah PKL yang cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam melakukan penataan sekaligus pemberdayaan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan implementasi kebijakan yang efektif agar tidak hanya menata, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan PKL.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL Pada Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kota Bandung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai kerangka analisis.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparatur pelaksana dan PKL sebagai kelompok sasaran, serta didukung oleh observasi lapangan dan studi dokumentasi terhadap regulasi dan data terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan PKL di Kota Bandung secara umum telah berjalan cukup baik. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi kepada pelaksana sudah relatif efektif dan konsisten, namun kepada PKL masih belum merata sehingga pemahaman kebijakan bervariasi. Pada aspek sumber daya, kualitas sumber daya manusia dinilai memadai, tetapi jumlah staf dan pendamping masih terbatas serta anggaran belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan program. Pada aspek disposisi, pelaksana menunjukkan sikap yang responsif dan kooperatif dalam menjalankan kebijakan, meskipun tingkat partisipasi PKL dalam program pemberdayaan masih belum optimal. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan kewenangan telah jelas serta didukung oleh SOP, namun adanya fragmentasi antarinstansi menyebabkan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada efektivitas koordinasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Pemberdayaan

ABSTRACT

Adri Firman Ramadhan, 1228010003, 2026: “Implementation of the Street Vendors (PKL) Empowerment Policy at the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Bandung City”

Street Vendors (PKL) are part of the informal sector that play an important role in the regional economy. However, their existence is often associated with various problems, such as disorderliness, limited access to business permits, and low business capacity. In Bandung City, the large number of street vendors spread across various areas presents a significant challenge for the government in managing and empowering them optimally. Therefore, an effective policy implementation is needed not only to regulate but also to improve the welfare of street vendors.

This study aims to analyze and describe the implementation of the street vendor empowerment policy at the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Bandung City, as well as to identify the factors influencing the success of its implementation. This research employs George C. Edwards III's policy implementation theory, which consists of four main dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, as the analytical framework.

The research used a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews with implementing officials and street vendors as the target group, supported by field observations and documentation studies of relevant regulations and related data.

The results of the study indicate that the implementation of the street vendor empowerment policy in Bandung City has generally been carried out quite well. In terms of communication, the dissemination of information to policy implementers has been relatively effective and consistent; however, information delivery to street vendors has not been evenly distributed, resulting in varying levels of policy understanding. In terms of resources, the quality of human resources is considered adequate, although the number of staff and facilitators remains limited, and the budget has not fully met program needs. Regarding disposition, policy implementers demonstrated responsive and cooperative attitudes in carrying out the policy, although the participation level of street vendors in empowerment programs is still not optimal. Meanwhile, in terms of bureaucratic structure, the division of duties and authority has been clearly defined and supported by standard operating procedures (SOPs). However, fragmentation among institutions causes policy implementation to depend heavily on the effectiveness of inter-agency coordination.

Keywords: Policy Implementation, Street Vendors, Empowerment